

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengimplentasian politik luar negeri dan diplomasi Indoensia diwujudkan pada prioritas kepentingan nasional Indonesia, pertumbuhan ekonomi, visi pembangunan nasional, penguatan demokrasi, tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. Menurut (Prasetya & Srifauzi, 2018), politik bebas dan aktif merupakan pendekatan politik luar negeri Indonesia yang menjunjung tinggi cita-cita netralitas terhadap beragam tujuan politik dengan tetap terlibat dalam memajukan perdamaian global. Dalam pelaksanaanya, Indonesia konsisten dalam melakukan kerjasama bilateral, multilateral dan kerjasama regional.

Hal ini dilakukan sejalan dengan upaya diplomasi Indonesia dalam membangun dan meneruskan perwujudan kepentingan nasional melalui politik luar negeri yang bebas aktif. Diplomasi kemanusiaan sendiri merupakan usaha untuk memobilisasi dan melibatkan banyak pihak yang memiliki kekuasaan dan wewenang agar mereka memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan pihak yang lebih lemah, dengan tujuan melindungi dan menyelamatkan mereka. Pihak yang lemah dalam konteks ini merujuk kepada individu atau kelompok yang menjadi korban konflik, peperangan, atau bencana alam.

Bagi suatu negara, diplomasi kemanusiaan adalah sarana untuk mengekspresikan rasa empati dan solidaritas internasionalnya. Inilah yang akan membantu negara tersebut memperkuat reputasinya di dunia internasional, sekaligus menjadi alat untuk membangun kepercayaan dan kerjasama yang dapat memperluas tujuan kebijakan luar negeri guna mencapai kepentingan nasional. Menurut sejarah, hubungan antara Indonesia dan Palestina telah terjalin erat sejak Indonesia mencari dukungan internasional untuk pengakuan kemerdekaannya. Indonesia sangat konsisten dalam memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan Palestina untuk mencapai kemerdekaan, sebagaimana negara-negara lainnya (Asyahidd & Amaliya, 2022).

Secara historis, pendudukan Israel di wilayah Palestina dimulai dengan munculnya paham zionisme, yang mengusung gagasan bahwa bangsa Yahudi harus memiliki tanah air mereka sendiri. Gagasan ini kemudian berkembang menjadi gerakan internasional yang dipimpin oleh Theodor Herzl, seorang keturunan Yahudi dari bangsa Austro-Hungaria. Gerakan ini memulai melakukan ekspansi wilayah secara besar-besaran ke wilayah Palestina pada akhir abad ke-19, dengan didasarkan pada keyakinan dan klaim bahwa wilayah Palestina adalah Eretz Israel, tanah suci yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Yahudi (Andriyanto & L Djono, 2021).

Konteks ini diperkuat oleh pernyataan yang dikenal sebagai *Deklarasi Balfour*, yang dikeluarkan oleh Inggris. Dalam deklarasi tersebut, Inggris menyatakan niatnya untuk menjadikan Palestina sebagai tempat tinggal bagi orang Yahudi. Akibatnya, luas wilayah Palestina mengalami penyusutan setelah berakhirnya Perang Dunia I (Ningsih, 2021). Pada masa itu, wilayah Palestina berada di bawah kendali Inggris. Berdasarkan mandat Britania, Liga Bangsa-Bangsa kemudian mengakui bahwa wilayah Palestina adalah milik bangsa Yahudi. Situasi ini berlanjut hingga PBB, sebuah lembaga dunia, memutuskan pada tahun 1947 untuk memisahkan wilayah Palestina menjadi dua bagian, yakni wilayah yang diperuntukan untuk Yahudi dan wilayah untuk negara Arab (Prasetya & Srifauzi, 2018).

Keberlanjutan resistensi Israel yang berlangsung tidak mengherankan, karena negara ini selalu memperoleh dukungan penuh dari Amerika Serikat. Meskipun terdapat tekanan yang berasal dari komunitas internasional terhadap negara kecil ini, Amerika Serikat tetap mempunyai kebebasan untuk mencapai tujuannya sendiri tanpa terlalu dipengaruhi oleh kritik dari negara lain yang tidak setuju dengan kebijakan luar negerinya. Amerika Serikat sering kali memveto resolusi Dewan Keamanan PBB meskipun resolusi tersebut telah disetujui, dan hal ini merupakan sebuah kontradiksi yang jelas. Sebaliknya, bagi Palestina, tampaknya nasib dan keadilan mereka tidak menjadi fokus utama, karena posisi dominan Amerika Serikat di dunia yang telah mendorong mereka pada posisi yang sulit dan terisolasi.

Amerika Serikat mempunyai sekutu negara Arab yang tampaknya bersedia dengan mudah memenuhi tuntutan mereka (Mudore, 2019). Sikap negara-negara Arab terhadap nasib Palestina sering kali terasa sebagai formalitas semata. Mereka tampaknya kurang komitmen dalam perjuangan untuk kemerdekaan Palestina. Sebaliknya, Indonesia memegang peran sentral dalam memberikan dukungan serta berjuang untuk kemerdekaan rakyat Palestina. Sebagai negara mayoritas Muslim yang teguh dalam prinsip bahwa semua bangsa berhak atas kemerdekaan, Indonesia secara khusus memberikan perhatian yang serius terhadap konflik Israel-Palestina. Indonesia meminta semua pihak untuk bekerja sama menghentikan agresi Israel di wilayah Palestina dan selalu mendukung rakyat Palestina dalam perjuangannya menegakkan hak dan kedaulatannya.

Indonesia telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk bertemu langsung dan mengambil resolusi yang meminta diakhirinya serangan militer Israel. Tindakan ini semakin memperburuk penderitaan rakyat Palestina hingga saat ini. Selain berpartisipasi dalam berbagai forum diskusi, Indonesia juga memberikan dukungan nyata melalui bantuan konkret seperti membangun rumah sakit, sekolah, dan fasilitas lainnya (Saragih, 2018). Indonesia juga mendukung konsep *two state solution*, sebagaimana Presiden Indonesia, Joko Widodo, nyatakan dalam KTT ke-6 ASEAN-AS yang berlangsung di Singapura, 15 November 2018. Ia menyatakan, "Solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian yang adil" (Kementrian, 2018).

Indonesia meyakini bahwa solusi dua negara merupakan pilihan terbaik untuk mewujudkan perdamaian abadi dan mengakhiri konflik antara Palestina dan Israel. Terkait dengan konflik Palestina-Israel, PBB yang merupakan badan internasional mempunyai misi untuk menegakkan perdamaian dunia, telah memainkan peran sebagai mediator antara kedua belah pihak dan telah berusaha keras untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Keterlibatan dan kontribusi PBB dalam konflik Israel-Palestina pertama kali terlihat pada 1947, ketika PBB mengeluarkan Resolusi No. 181 tentang pembagian wilayah Palestina. Resolusi ini menghasilkan pembagian wilayah, dengan 55 persen wilayah diberikan kepada bangsa Yahudi dan sisanya untuk bangsa Arab (Wirajaya, 2020). Hasil dari resolusi ini adalah keputusan mayoritas anggota PBB untuk mengakhiri penguasaan Inggris atas Palestina, yang telah berlangsung sejak Perang Dunia I dan berakhir pada tanggal 1 Agustus 1948.

Yerusalem adalah kota yang menjadi klaim kedua negara untuk wilayahnya sendiri. Pada tahun 1948, terjadi konflik bersenjata antara Israel dengan beberapa negara Arab yang tidak setuju atas resolusi yang diajukan. Akibatnya, Israel menguasai sebagian besar wilayah Palestina, yaitu sekitar 78%, dan hampir satu juta penduduk Arab melarikan diri ke negara-negara tetangga, di mana mereka tidak diizinkan untuk kembali. PBB telah berusaha untuk bertindak sebagai mediator dalam hubungan diplomatik antara Israel dan Palestina sebagai bagian dari peran mereka dalam menjaga perdamaian dan keamanan global (Wirajaya, 2020). Sejumlah upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam mencari jalan menuju perdamaian.

Resolusi semacamnya selalu gagal dijalankan. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo telah secara konsisten menegaskan posisi Indonesia yang mendukung penuh hak Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Mengindikasikan jika langkah ini berhasil, Indonesia akan memiliki potensi untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Sampai saat ini, Indonesia masih tetap mempertahankan konsistensi untuk tidak menjalin hubungan dengan mereka. Keputusan itu didasarkan pada sejumlah kesamaan antara Indonesia dan Palestina, termasuk fakta bahwa keduanya memiliki mayoritas penduduk Muslim dan memiliki historis akan penjajahan negara lain. Lebih dari itu, Indonesia selalu mendasarkan kebijakannya pada prinsip-prinsip konstitusi yang menentang segala bentuk penjajahan. Ini menjadikan ikatan emosional antara Indonesia dan Palestina semakin kuat seiring berjalannya waktu.

B. Rumusan Masalah

Melihat dasar-dasar yang telah diuraikan, Indonesia memiliki inisiatif aktif dan tekad kuat untuk mendorong tercapainya perdamaian dunia melalui penyelesaian konflik Israel-Palestina. Oleh karena itu, permasalahan penelitian yang dapat diidentifikasi dalam konteks ini adalah **“Bagaimana Peran Diplomasi Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina Pasca Usulan *Two State Solution* Berdasarkan Resolusi PBB No. 181?”**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran diplomasi Indonesia dalam kemerdekaan Palestina pasca diperkenalkannya konsep *two state solution* berdasarkan Resolusi PBB No. 181 sebagai upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina.

1. Tujuan Teoritis

Tujuan teoritis penelitian ini adalah memberikan pengetahuan ilmu Studi Hubungan Internasional dengan menyediakan pengetahuan mendalam kepada para akademisi. Penelitian ini akan memperdalam pemahaman tentang peran diplomasi Indonesia dalam mencapai kemerdekaan Palestina pasca usulan *two state solution* yang berlandaskan pada Resolusi PBB No. 181.

2. Tujuan Praktis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan analitis dan memperluas pemahaman di bidang studi hubungan internasional. Setelah gagasan solusi dua negara diperkenalkan, penelitian ini akan membantu untuk lebih memahami bagaimana diplomasi Indonesia mendukung upaya untuk memenangkan kemerdekaan Palestina.

D. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada, peneliti mengaplikasikan teori dan konsep yang telah dirumuskan dalam suatu kerangka pemikiran, di antaranya :

1. Teori Diplomasi

Menurut Sir Earnest Satow dalam (Prayuda & Sundari, 2020), diplomasi adalah gabungan dari penerapan kecerdasan dan taktik dalam menjalankan aktivitas resmi antara pemerintah dan negara. Lebih lanjut, beberapa pakar juga menganggap bahwa diplomasi pada substansinya merupakan upaya untuk menggerakkan kelompok atau aktor negara lain agar sesuai dengan pemahaman negara itu sendiri. Meskipun diplomasi sering dikaitkan dengan upaya menemukan solusi damai terhadap konflik, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan penuh ketika metode tersebut tidak mencapai hasil yang diinginkan.

Perlindungan kepentingan nasional, pelestarian kebebasan politik, dan pelestarian integritas wilayah merupakan tujuan diplomasi di tingkat internasional. Negosiasi adalah tujuan utama diplomasi, dan melalui pembicaraan yang positif, perbedaan pendapat dapat diselesaikan dalam menjaga kepentingan nasional. Jika pembicaraan tidak berhasil, maka konflik bersenjata sering kali menjadi pilihan terakhir setelah upaya diplomasi. Terdapat tiga pendekatan dasar dalam pelaksanaan diplomasi nasional, yaitu kerja sama, konsiliasi, dan konfrontasi.

Pada dasarnya, tujuan utamanya adalah menemukan cara untuk mengkoordinasikan kepentingan antara negara-negara melalui proses negosiasi diplomatik, yang melibatkan pemberian dan penerimaan berbagai bentuk kesepakatan. Dalam konteks ini, diplomasi dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama, *Soft Diplomacy*, yang melibatkan usaha diplomatik untuk mencapai penyelesaian damai melalui aspek budaya, bahasa, persahabatan, dan ekonomi. Kedua, *Hard Diplomacy*, yang mengacu pada penggunaan diplomasi dalam bentuk konflik bersenjata atau agresi militer serta tekanan politik (Yani & Lusiana, 2018).

Pendekatan *soft diplomacy* mencakup berpartisipasi dalam diskusi bilateral dengan aktor lain dan mencapai kesepakatan dengan pihak ketiga, seperti Mahkamah Internasional. Sementara pendekatan *hard diplomacy* melibatkan peningkatan kekuatan militer suatu negara dan berkolaborasi dengan negara lain dalam meningkatkan potensi deterrence (pencegahan) jika terjadi konflik. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, konflik ini mempunyai pengaruh sistemik secara keseluruhan terhadap perdamaian dunia dan kemajuan peradaban manusia. Konflik ini telah membuat banyak kelompok di beberapa negara menyerukan kemerdekaan Palestina. Konflik Israel dan Palestina bukan hanya melibatkan kedua negara, tetapi juga beragam pihak dan aktor di kawasan sekitarnya, terutama dengan adanya campur tangan beberapa negara Barat yang mendukung Israel.

Pengaruh konflik ini, berimbas pada aspek perdagangan ekonomi internasional serta posisi strategis kebijakan dan diplomasi suatu negara (Prayuda & Sundari, 2020). Mengutip dari (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022) Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menetapkan sikap politik yang konsisten dalam mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Namun, pencapaian ini tidaklah mudah tanpa adanya kesungguhan pemerintah Indonesia dalam menjalankan hubungan diplomatik yang konsisten, termasuk upaya mediasi, negosiasi, dan diplomasi.

Upaya Indonesia dalam membantu penyelesaian konflik Palestina telah menjadi agenda prioritas diplomasi Indonesia. Adapun latar belakang yang melandasi komitmen Indonesia dalam konteks ini adalah fakta bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, yang terwujud dalam keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Selain itu, Indonesia, sebagai salah satu negara pendiri Gerakan Non-Blok, memiliki reputasi sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat.

Indonesia juga menduduki posisi Keanggotaan Tidak Tetap dalam Dewan Keamanan PBB (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Kemudian, latar belakang empiris penanganan konflik di wilayah Filipina Selatan dan Kamboja, serta keberhasilan dalam menyelesaikan konflik secara damai di Aceh, Poso, dan Ambon telah memperkuat legitimasi Indonesia dalam peran mediasi. Oleh karena itu, penggunaan

teori diplomasi dalam penelitian ini dapat dianggap relevan dan menyeluruh untuk memahami serta menganalisis peran dan strategi diplomasi Indonesia dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina.

2. Konsep *Soft Power*

Kekuatan suatu negara dapat bervariasi berdasarkan potensi yang dimilikinya. Bagi negara yang bukan termasuk dalam kategori superpower, baik dari segi militer maupun ekonomi, soft power menjadi jalan yang dapat digunakan guna meningkatkan pengaruh mereka dalam dunia internasional. Tujuan utama bukanlah untuk mendominasi, melainkan untuk memperbaiki citra dan kehadiran mereka di arena internasional (Pujayanti, 2018). Konsep *soft power diplomacy*, seperti yang didefinisikan oleh Joseph Nye dalam (Prabhawati, 2018), merujuk pada kapabilitas dalam memengaruhi aktor negara dengan kerja sama merumuskan agenda prioritas, melaksanakan kegiatan positif, dan melakukan kerjasama untuk mencapai titik hasil yang sesuai.

Di era saat ini, konflik bersenjata tidak lagi menjadi opsi utama untuk mencapai tujuan nasional sebuah negara. Sebaliknya, konsep *soft power* menjadi salah satu alternatif yang tersedia bagi banyak negara di dunia. Indonesia, sebagai contoh, telah memanfaatkan diplomasi kemanusiaan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Dalam konteks ini, daya tarik budaya, nilai-nilai nasional, dan kebijakan luar negeri menjadi faktor-faktor yang memiliki daya tarik. *Soft power*

dapat di aktualisasikan melalui kombinasi instrumen dan kebijakan diplomasi yang digunakan oleh suatu negara.

Indonesia, sebagai negara yang heterogen namun mampu menjaga stabilitasnya, telah dikenal di dunia sebagai contoh keberhasilan negara multi-etnik. Hal ini memberikan Indonesia keunggulan dalam menjalankan diplomasi *soft power* yang berfokus pada kekayaan budaya, terutama dalam konteks toleransi beragama melalui kerjasama dalam dialog antaragama. Indonesia telah menggunakan keunggulan ini untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, terutama dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina (Pujayanti, 2018).

Indonesia mempunyai kapasitas dengan sumber daya yang unggul dalam menkonstruksi daya tarik yang ada. Negara ini adalah salah satu dari sedikit negara yang memiliki lembaga demokrasi yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan kondisi politik yang stabil. Meskipun melalui beberapa penelitian (Yani & Lusiana, 2018) dinyatakan bahwa Indonesia masih memiliki kelemahan, terutama dalam sektor militer dan ekonomi, komunitas internasional justru memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada Indonesia untuk menjalin kerja sama. Melalui *konsep soft power* ini, penelitian akan menganalisis bagaimana Indonesia berkontribusi dan mengedepankan kepentingan nasionalnya untuk ikut aktif dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina.

E. Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun, Judul, Nama Jurnal	Perumusan masalah masalah Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian		Kontribusi/Hasil/Temuan	Kesimpulan	Perbedaan penelitian
				Pengumpulan data	Level Analisis			
1.	Syarif Bahaudin Mudore, 2019, Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina, Jurnal CMES	“Bagaimana peran diplomasi Indonesia dalam konflik Israel-Palestina?”	Jurnal tersebut menggambarkan bagaimana diplomasi Indonesia berlangsung di konflik Israel-Palestina. Dengan Indonesia adalah salah satu negara yang aktif menyerukan Palestina kemerdekaan dengan solusi dua negara.	Kualitatif, Data Sekunder	Negara	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Indonesia telah berperan aktif dalam peran sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia menentang kebijakan Donald Trump dalam pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israel Terbukti dengan hal ini bahwa Indonesia telah menjalankan fungsi sebagai co-sponsor, fasilitator, mediator, partisipan, inisiator, dan pembela dalam berbagai upaya untuk membantu penyelesaian konflik Israel-Palestina..	Konflik panjang Israel dan Palestina telah berlangsung lama. Sikap teguh dari pihak Israel telah memungkinkan mereka untuk menguasai sebagian wilayah Palestina. Dalam konteks ini Indonesia telah berperan secara signifikan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.	Penelitian sebelumnya telah memfokuskan pada peran diplomasi Indonesia yang didasarkan pada prinsip penolakan terhadap penjajahan dan penindasan terhadap rakyat Palestina. Namun, penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi aspek diplomasi yang mencoba untuk mengusulkan solusi berupa konsep dua negara sebagai bagian dari upaya untuk meresolusi konflik antara kedua negara tersebut.
2.	Rendi Prayuda dan Rio Sundari, 2020, Diplomasi Dan Power: Sebuah Kajian Analisis, <i>Journal of Diplomacy and International Studies</i>	“Bagaimana diplomasi berperan menjadi alat dalam pengimplementasian kepentingan nasional suatu	Dalam jurnal penelitian ini, dipelajari mengenai signifikansi diplomasi sebagai sebuah instrumen untuk menjalankan	Kualitatif, Data Sekunder	Negara	Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat efektivitas diplomasi suatu negara sangat tergantung pada sejauh mana negara tersebut memiliki kekuatan	Diplomasi merujuk pada upaya damai dalam menyampaikan kepentingan nasional suatu negara melalui interaksi dalam sistem internasional, dalam konteks lingkungan	Penelitian sebelumnya telah memfokuskan pada analisis inti dari diplomasi yang terpusat. Namun, penelitian ini lebih mengeksplorasi aspek substansial dari diplomasi dalam konteks

No	Penulis, Tahun, Judul, Nama Jurnal	Perumusan masalah masalah Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian		Kontribusi/Hasil/Temuan	Kesimpulan	Perbedaan penelitian
				Pengumpulan data	Level Analisis			
		negara terhadap negara lain?"	hubungan antar negara di tingkat politik internasional dengan tujuan untuk mengkomunikasikan kepentingan nasional suatu negara kepada negara-negara lain.			nasional yang kuat. Beberapa faktor yang memengaruhi kesuksesan diplomasi dapat dianalisis melalui konteks diplomasi global, dinamika dalam hubungan diplomatik, dan kondisi dalam negeri.	diplomasi, dan dalam konteks hubungan politik di tingkat domestik. Efektivitas diplomasi sebuah negara dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya adalah kekuatan nasional dan sumber daya yang dimilikinya.	penyelesaian konflik Israel-Palestina.
3.	Muh. Novan Prasetya dan Aulia Srifauzi, 2018, Diplomasi Politik Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina, Jurnal PIR	"Bagaimana diplomasi politik Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina?"	Dalam jurnal penelitian ini, dibahas mengenai usaha untuk memberikan dukungan kepada Palestina dalam perjuangannya untuk mengamankan hak dan kemerdekaannya. Upaya-upaya diplomatik telah digunakan untuk mengumpulkan dukungan internasional dalam membela hak kemerdekaan Palestina.	Kualitatif, Data Sekunder	Negara	Indonesia bersama dengan anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), secara berkesinambungan mengadvokasi hak kemerdekaan Palestina. Tindakan ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.	Indonesia secara konsisten mendukung hak-hak rakyat Palestina dan berperan aktif dalam mempromosikan kemerdekaan Palestina sebagai negara merdeka. Namun, Indonesia menyadari bahwa untuk mencapai perdamaian global dan menyelesaikan konflik Israel-Palestina, kerjasama internasional diperlukan. Indonesia mengakui bahwa penyelesaian konflik ini tidak dapat dicapai secara individu dan harus melibatkan negara-negara lain, termasuk Israel, dalam upaya mencapai rekonsiliasi. Hal ini karena mengandalkan hanya	Penelitian sebelumnya memiliki relevansi yang mirip dengan pembahasan dalam penelitian ini. Namun, penelitian ini membedakan dirinya dengan melakukan sub-kajian yang berfokus pada perspektif solusi dua negara yang merujuk pada Resolusi PBB Nomor 181.

No	Penulis, Tahun, Judul, Nama Jurnal	Perumusan masalah Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian		Kontribusi/Hasil/Temuan	Kesimpulan	Perbedaan penelitian
				Pengumpulan data	Level Analisis			
							Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebagai platform diplomasi tunggal akan menjadi lebih sulit dalam menyelesaikan konflik tersebut.	
4.	Muhammad Badry Muntasyir, 2022, Peran Aktif Amerika Serikat Era Joe Biden Dalam Konflik Palestina dan Israel, PIR Journal	“Bagaimanakah Kebijakan Amerika Serikat Era Joe Biden yang memengaruhi peran aktifnya dalam Konflik Palestina dan Israel?”	Fokus jurnal ini adalah menganalisis peran Amerika Serikat dalam konflik Israel-Palestina era Joe Biden, di mana AS berperan sebagai mediator dengan mendukung solusi dua negara, berbeda dengan pendekatan pro-Israel pada masa pemerintahan Donald Trump.	Kualitatif, Data Sekunder	Negara	Penelitian menunjukkan di bawah Joe Biden Amerika mendukung solusi dua, yang lebih objektif dibandingkan dengan pendekatan pro-Israel era Donald Trump. Namun, kepentingan AS terhadap Israel menciptakan paradoks dalam hubungan ini, menunjukkan kecenderungan AS mendukung Israel dalam resolusi konflik.	Penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan <i>two state solution</i> oleh Amerika Serikat telah mengatasi kendala-kendala terhadap kemerdekaan Palestina. Solusi ini membuka peluang perdamaian melalui perundingan yang sebelumnya tertutup di era Trump.	Penelitian sebelumnya mengupas peran aktif era Joe Biden dalam konflik Palestina dan Israel dengan penekanan pada gagasan <i>two state solution</i> . Sementara dalam penelitian ini, fokus utamanya lebih terarah pada analisis diplomasi Indonesia dan kontribusinya yang nyata dalam upaya menyelesaikan konflik di antara kedua negara tersebut..

1. Jurnal penelitian oleh Syarif Bahaudin Mudore dengan judul “*Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina*” (Mudore, 2019), mengkaji tentang upaya Indonesia untuk berperan penting dalam mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina melalui diplomasi. Indonesia merupakan negara yang memberikan perhatian khusus terhadap isu Israel-Palestina dan aktif menyerukan untuk perdamaian dengan solusi dua negara. Kesamaan antara jurnal tersebut dan penelitian ini adalah keduanya menekankan peran diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dan penolakan terhadap penjajahan serta penindasan terhadap rakyat Palestina. Namun, perbedaan utama dalam penelitian ini adalah fokus pada penawaran solusi dua negara sebagai bagian dari upaya untuk penyelesaian konflik. Jurnal tersebut akan digunakan sebagai referensi oleh penulis untuk keperluan perbandingan dalam penelitian skripsi ini.
2. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Rendi Prayuda dan Rio Sundari dengan judul “*Diplomasi Dan Power: Sebuah Kajian Analisis*” (Prayuda & Sundari, 2020), menjelaskan tentang bagaimana pentingnya diplomasi yang menjadi sebuah alat pengimplementasian dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Kekuatan nasional sebuah negara memainkan peran penting dalam keefektifan diplomasi yang dijalankan. Implementasi dari kepentingan nasional negara tentu saja memiliki pengaruh dalam membentuk perspektif publik dari negara tersebut. Karenanya, jurnal tersebut mempunyai perbedaan dengan penelitian ini. Jurnal tersebut lebih berfokus pada analisis pokok diplomasi, sementara kesamaannya terletak pada analisis keterkaitan

diplomasi, dengan penelitian ini menekankan aspek substansial diplomasi dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina.

3. Jurnal penelitian oleh Muh. Novan Prasetya dan Aulia Srifauzi, dengan judul *“Diplomasi Politik Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina”* (Prasetya & Srifauzi, 2018), menjelaskan tentang upaya konkret yang dilakukan Indonesia dalam memperjuangkan hak, kebebasan dan perdamaian Palestina dengan langkah-langkah diplomasi yang ditempuh sebagai perwujudan menggalang kekuatan internasional untuk lebih proaktif dalam menentukan kebijakan atas konflik yang terjadi. Banyak hal telah dilakukan termasuk didalamnya terdapat perundingan dan kesepakatan yang telah dibuat. Akan tetapi, tidak ada kesepakatan yang berakhir pada kedaulatan penuh bagi Palestina. Karena itu, Palestina secara aktif melakukan upaya masif untuk mendapatkan pengakuan atas kedaulatannya, untuk mereka dapat mencapai status yang setara dengan apa yang mereka miliki pada tahun 1967, yang telah diakui secara luas. Kesamaan antara jurnal tersebut dan penelitian ini adalah relevansi yang kuat dalam pembahasan yang menyeluruh yang dilakukan dalam penelitian ini. Namun, perbedaannya terletak pada subtopik yang dianalisis. Maka dari itu, jurnal ini dapat menjadi acuan referensi dalam proses penyajian data dan digunakan sebagai pembanding dengan penelitian saat ini..
4. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Badry Muntasyir, dengan judul *“Peran Aktif Amerika Serikat Era Joe Biden Dalam Konflik Palestina dan Israel”* (Muntasyir, 2022), menggambarkan peran dan kontribusi Amerika dalam upaya mediasi konflik Israel-Palestina di bawah kepemimpinan Presiden Joe

Biden, di mana saat ini mereka mengambil posisi netral dan objektif dengan mengusulkan solusi dua negara sebagai langkah awal untuk mengurangi risiko atau mencegah konflik berkelanjutan. Ini menunjukkan perbedaan dengan pendekatan masa pemerintahan Donald Trump yang lebih cenderung mendukung Israel. Lengsernya Donald Trump dan digantikan Joe Biden, tampaknya sedikit membawa angin segar dalam regulasi kebijakan, partisipasi dan peran mereka menengahi isu ini. Pada beberapa kesempatannya Joe Biden kerap kali menyampaikan solusi dua negara merupakan langkah penyelesaian terbaik untuk menyelesaikan agresi dan menciptakan perdamaian bagi kedua negara. Dalam masa pemerintahannya yang mengutamakan multilateralisme dan pro-aliansi, Joe Biden menciptakan beragam peraturan dan kebijakan yang membuka pintu dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Secara tidak langsung terpilihnya Joe Biden membuat Israel sedikit khawatir akan perundingan-perundingan yang bisa mengganggu eksistensi maupun kebijakan yang telah ada. Kesamaannya terletak pada pemilihan studi kasus negara yang sama dan pembahasan yang serupa. Namun, perbedaannya terletak pada fokus utama penelitian ini, yang lebih menekankan pada peran diplomasi Indonesia dan langkah konkret yang diambil dalam mendukung penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina. Maka demikian, artikel ini dapat dijadikan rujukan sumber data tambahan yang mendukung penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui sumber data sekunder, termasuk studi pustaka seperti, jurnal ilmiah, buku, situs web, penelitian terdahulu, skripsi, dan artikel. Peneliti tidak secara langsung mengumpulkan data sendiri tetapi mengandalkan data dan dokumen yang telah dihasilkan oleh pihak lain.

G. Level Analisis

Penelitian ini berfokus pada peran aktor negara dalam menganalisis situasi. Analisis tingkat negara akan menitikberatkan pada bagaimana keputusan dibuat melalui diplomasi dan politik luar negeri. Pada akhirnya, penelitian yang berjudul "*Peran Diplomasi Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina Pasca Usulan Two State Solution Berdasarkan Resolusi PBB No. 181*" yang mengusung visi *Two State Solution*, penelitian ini memberikan alternatif dalam proses pencapaian perdamaian. Namun, proses ini tidak terjadi secara tiba-tiba, hal tersebut telah ada pada sejarah perundingan perdamaian sebelumnya. Indonesia merupakan satu negara yang konsisten untuk mendukung solusi dua negara. Indonesia tetap tegak lurus dalam memperkuat identitas dan peran kepemimpinannya, dengan mengutamakan prinsip kemanusiaan untuk mengurangi jumlah korban sipil dan memulihkan wilayah konflik dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional yang diperjuangkan oleh Indonesia untuk Palestina.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan isi penelitian, maka skripsi ini di bagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB 1 : Merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika kepenulisan.

BAB 2 : Membahas mengenai gambaran umum terkait perubahan dan eskalasi dalam dinamika konflik Israel-Palestina, dengan fokus pada peristiwa Nakba hingga proses pengakuan Yerusalem dengan menganalisis berbagai respons yang diberikan oleh Presiden-Presiden Indonesia terhadap perkembangan konflik ini.

BAB 3 : Berisi tentang pembahasan dan analisis kekuatan dan tipologi dukungan yang diberikan oleh masing-masing Presiden Indonesia.

BAB 4 : Membahas tentang pola kebijakan dan diplomasi luar negeri Indonesia sepanjang masa kepemimpinan dari Soekarno hingga Joko Widodo, mengidentifikasi perubahan dalam pendekatan diplomasi, model kebijakan, sikap politik, serta jenis dukungan yang diberikan Indonesia kepada Palestina.

BAB 5 : Berisi kesimpulan dari penelitian ini.